



GAPKI

NEWS

INI STRATEGI GAPKI HADAPI

TARIF IMPOR AMERIKA



Bijak Menghadapi Kebijakan Trump

Pembaca yang budiman,

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena *GAPKI News* edisi Mei 2025 telah terbit setelah kita menikmati libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Tidak lupa kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf.

Begitu memasuki April 2025, kita dikejutkan dengan langkah kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menaikkan tarif impor hingga 35%. Langkah ini membuat panik dunia, tidak terkecuali industri sawit. Indonesia terkenal tarif resiprokal 32% yang membuat harga CPO yang masuk pasar Amerika melonjak sehingga daya saingnya menurun karena harga tidak kompetitif. Ini satu pukulan yang harus dicarikan jalan keluarnya.

Sebagai asosiasi pengusaha kelapa sawit, GAPKI tentu harus bersikap. Langkah yang diambil harus konstruktif agar berdampak positif dalam jangka panjang. Tentu saja GAPKI tidak bisa sendiri melangkah. Paling tidak, GAPKI sudah memberikan usulan strategis bagi pemerintah sebagai langkah jangka pendek dan jangka panjang. Usulan GAPKI mendapat respon positif yang akan melahirkan kebijakan yang lebih mendukung industri ini.

Langkah strategis GAPKI ini menunjukkan kiprah dan kontribusi GAPKI tidak hanya untuk anggotanya, namun industri sawit secara utuh. Masukan GAPKI inilah yang menjadi topik utama dalam *GAPKI News* edisi Mei 2025 ini. Tema lain yang tidak kalah menarik adalah langkah Satgas Sawit dalam penyitaan sejumlah kebun sawit di Kalimantan Tengah. Bagi GAPKI, penegakan hukum harus adil dalam makna yang sebenarnya.

Tema lain dalam *GAPKI News* edisi Mei 2025 ini juga menggambarkan bagaimana kiprah di daerah maupun pusat dalam mendorong kemajuan industri sawit nasional. Semoga setiap langkah GAPKI berdampak positif terhadap industri sawit dan bangsa Indonesia. Selamat membaca. ■

Salam,
Redaksi GAPKINews

GAPKINews

Media Komunikasi dan
Informasi Anggota GAPKI

PENERBIT
GAPKI Pusat

PEMBINA
Eddy Martono
Sany Anthony
Susanto Yang
Satrija B. Wibawa
M. Hadi Sugeng
Mona Surya

PENGARAH
Mukti Sardjono

TIM AHLI
Para Ketua Bidang
Pengurus Pusat GAPKI

PENANGGUNG JAWAB
Fenny Sofyan

Dewan Redaksi
Yudha Negara Nyoman
Indah Permata Soegyarto
Ratri Melanda Maharani
Dyah Laras Wulandari
Susan Sri Rahayu
Eko Tamba

ALAMAT
Kantor GAPKI Pusat
Sudirman Park Blok B-18
Jalan KH Mas Mansur Kav. 35
Jakarta 10220

(+62) 21-5794-3871
gapki@gapki.id | gapkipusat@
yahoo.com



Panen Jagung Perdana Ketahanan Pangan dan Energi..... 13

Salam Redaksi.....	2
Daftar Isi.....	3
Dua Faktor Pemicu Penurunan Produksi CPO 2024.....	4
Produksi CPO 2025 Diprediksi Tumbuh 1,7 Persen.....	5
Ini Strategi GAPKI Hadapi Tarif Impor Amerika.....	6,7
Kepada DPR, GAPKI Minta Beban Ekspor CPO Dikurangi.....	8
GAPKI Optimistis Ekspor CPO ke Rusia Tembus 1 Juta Ton.....	9
Solusi Kebun Sawit Dalam Kawasan Hutan Harus Adil.....	10,11
Memperkuat Komitmen Perlindungan Pekerja Sektor Sawit.....	12
Potensi RBDPKO Sebagai Bahan Baku Utama SAF.....	14
Kesekretariatan Kunci GAPKI Mewujudkan Visi dan Misinya.....	15
Jaga Keseimbangan Ekspor, Pangan, dan Biofuel.....	16,17



DPD Inventarisir Masalah Industri Sawit..... 18



DPR Pantau Perkembangan PSR dan Hilirisasi Produk Sawit..... 19

Berbagi Bersama Anak Yatim Yayasan Al Mukhlisin.....	20
Sinergi GAPKI-PBNU Dukung Sawit untuk Kemandirian Ekonomi.....	21
CNFA Dorong GAPKI Perkuat Pasar CPO di China.....	22
Produksi dan Konsumsi CPO Turun, Stok Meningkat.....	23
Mempertegas Perlindungan Terhadap Pekerja Perempuan.....	24
GAPKI Ajak Pengusaha dan Petani Replanting Sawit.....	25
Penguatan Pengurus GAPKI Kalsel 2024-2029.....	26
Gubernur Minta GAPKI Sumsel Semakin Solid.....	27
Aris Supratman Pimpin GAPKI Cabang Kalbar.....	28

DUA FAKTOR PEMICU PENURUNAN PRODUKSI CPO 2024

Apabila ekspor terus menurun, potensi pasar yang hilang akan menjadi ancaman jangka panjang bagi Indonesia.

Tahun 2024 menjadi salah satu catatan penting industri sawit nasional karena penurunan produksi minyak sawit mentah tidak dapat dihindari. Banyak nilai merahnya, kata Sekjen GAPKI, M. Hadi Sugeng dalam konferensi pers Syukuran Hari Ulang Tahun ke-44 GAPKI sekaligus Buka Puasa Bersama di Jakarta pada 6 Maret 2025.

Produksi minyak sawit nasional sepanjang 2024 tercatat 52,7 juta. Pencapaian ini lebih rendah 3,8% dibandingkan dengan produksi 2023 sebanyak 54,8 juta ton. Banyak faktor yang menjadi penyebab penurunan produksi. Namun, yang paling dominan adalah cuaca memburuk yang ditandai hadirnya El Nino dan kondisi tanaman sawit yang semakin menua. Penurunan produksi pun tidak dapat dicegah.

Penurunan produk minyak sawit

mentah ini seperti mengkonfirmasi kondisi persawitan nasional dalam lima tahun belakangan ini. Sejak 2020, kinerja produksi sawit cenderung melandai karena tidak ada lonjakan signifikan baik dari sisi volume maupun produktivitas per hektar lahan. Produksi kelapa sawit per hektar dalam lima tahun terakhir berada di kisaran 51-54 juta ton.

Meski produksi menurun, konsumsi dalam negeri justru meningkat setiap tahun. Konsumsi pada tahun 2024 mencapai 23.859 ribu ton, meningkat 2,78% dibandingkan konsumsi tahun 2023 yang sebesar 23.213 ribu ton. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh konsumsi biodiesel dari B35 menjadi B40. Program B40 akan meningkatkan permintaan terhadap minyak sawit sebesar 18,7% menjadi 13,58 juta ton pada 2025

Sedangkan konsumsi untuk pangan sebesar 10.205 ribu ton atau turun 0,90% dibandingkan tahun 2023 sebanyak 10.298 ribu ton. Khusus konsumsi oleokimia mencapai 2.207

ribu ton, turun 2,69% dari 2.268 ribu ton pada 2023. Menurut M. Hadi Sugeng, peningkatan konsumsi ini mau tidak mau harus diimbangi dengan kemampuan di sisi hulu untuk menyesuaikan diri agar kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

Pelaku usaha sektor sawit berharap produksi yang stagnan di tengah peningkatan konsumsi ini tidak sampai mengorbankan ekspor. Sebab, kalau ekspor terganggu, dampaknya sangat luas antara lain pembiayaan biodiesel, PSR dan program lainnya. Ekspor harus benar-benar diperhatikan karena ada kecenderungan turun setiap tahun. Pada 2024, ekspor sawit 32,2 juta ton. Tapi, tahun ini hanya 29,5 juta ton atau terkoreksi 8,3%.

Dampak penurunan ekspor sangat terasa pada nilai ekspor yang turun dari US\$ 30,3 miliar menjadi US\$ 27 27,7 miliar (setara Rp 432,12 triliun. Apabila ekspor terus menurun akibat rendahnya produksi, potensi pasar yang hilang akan menjadi ancaman jangka panjang bagi Indonesia. ■





PRODUKSI CPO 2025 DIPREDIKSI TUMBUH 1,7 PERSEN

Produksi yang stagnan atau tumbuh tipis disebabkan oleh usia tanaman yang semakin tua.

Pertumbuhan produksi *crude palm oil* (CPO) dan *palm kernel oil* (PKO) pada tahun 2025 diprediksi tidak akan banyak perbedaan dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan produksi CPO dan PKO diperkirakan hanya 1,7% dibandingkan produksi tahun 2024 atau sekitar 53,60 juta ton. Sedangkan produksi CPO dan PKO pada 2024 tercatat sebanyak 52,76 juta ton. Pertumbuhan produksi sebesar ini tentunya sangat tipis. Bahkan, tak menutup kemungkinan produksi CPO dan PKO tahun 2025 justru stagnan.

Dengan produksi minyak sawit 53,60 juta ton ini, konsumsi diperkirakan mencapai 26,1 juta ton termasuk untuk biodiesel B40 sebesar 13,6 juta ton. Dengan perkiraan tersebut ekspor diperkirakan turun menjadi 27,5 juta ton, lebih rendah dari ekspor 2024 sebesar 29,5 juta ton. Perkiraan ini mempertimbangkan kecenderungan produksi dan konsumsi dalam negeri khususnya kebijakan penggunaan biodiesel serta

mempertimbangkan kecenderungan harga serta *supply and demand* minyak nabati dunia.

Perkiraan pertumbuhan produksi CPO dan PKO tahun 2025 disampaikan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan Sekretaris Jenderal GAPKI M. Hadi Sugeng dalam konferensi pers Hari Ulang Tahun GAPKI dan Buka Puasa Bersama di Jakarta pada 6 Maret 2025. Produksi yang stagnan atau tumbuh tipis ini disebabkan oleh usia tanaman yang semakin tua. Pada saat yang sama, kelapa sawit yang ditanam melalui program peremajaan sawit rakyat masih dalam usia tanaman belum menghasilkan.

Meski demikian, ada beberapa hal yang patut disyukuri dan diharapkan menjadi pendorong peningkatan produksi CPO dan PKO. Kondisi cuaca pada 2025 diprediksi lebih bersahabat sehingga menjadi satu faktor pemicu naiknya produksi. Selain itu, program B40 tentunya berdampak pada kenaikan harga, terutama pada



kuartal I tahun ini. Kenaikan harga akan mendorong produsen antusias meningkatkan produksinya. Karena itu, potensi kenaikan produksi hingga 1 juta ton pada tahun 2025 sangat mungkin terealisasi.

Berdasarkan data GAPKI, program B40 diperkirakan akan mengerek biodiesel sebesar 18,7% menjadi 13,58 juta ton pada 2025. Sedangkan ekspor diperkirakan turun 6,9% menjadi 27,50 juta ton pada 2025. Penurunan pasar ekspor dipicu oleh kurangnya pasokan untuk pasar ekspor yang dikhawatirkan berjalan dalam jangka panjang. Karena itu, GAPKI mengusulkan pentingnya perumusan strategi peningkatan produksi minyak sawit untuk kebutuhan pangan dan biodiesel sekaligus menyelamatkan pasar ekspor. ■

INI STRATEGI GAPKI HADAPI TARIF IMPOR AMERIKA

Pemerintah perlu menurunkan beban dalam negeri seperti PE, BK, dan DMO.

Ini bukan *April Mop*, lelucon atau tipuan untuk menghibur warga dunia. Memasuki bulan April 2025, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat kejutan. Pada 2 April 2025, Presiden Donald Trump merilis aturan baru: tarif impor 32 persen. Bagi Indonesia, kebijakan ini pukulan telak. Amerika memberlakukan tarif dasar 10 persen plus tambahan 32 persen untuk produk impor dari Indonesia mulai 9 April 2025 yang belakangan masa berlakunya diperpanjang 90 hari.

Kebijakan Trump membuat dunia bergolak, termasuk Indonesia. Sebab, ekspor Indonesia ke AS tahun lalu \$US 31 miliar (setara Rp 500 triliun) dengan produk utama alas kaki, tekstil, minyak nabati, dan alat listrik. Pemilik kasino di Las Vegas itu membuat sektor sawit terkena dampak. Ekspor CPO Indonesia ke AS tahun 2024 sebanyak 2,2 juta ton. Kalau kebijakan tarif impor diberlakukan, ekspor minyak sawit ke negeri Paman Sam itu diprediksi stagnan.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan selama ini ekspor sawit ke AS meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2020, ekspor CPO mencapai 1,5 juta ton dan meningkat menjadi 2,5 juta ton pada 2023 lalu menurun menjadi 2,2 juta ton pada 2024. Kebijakan tarif impor Presiden Trump membuat harga produk Indonesia

yang masuk ke AS menjadi lebih mahal. Karena itu, ekspor minyak sawit diprediksi stagnan.

Kebutuhan pasar AS terhadap minyak sawit tidak dapat digantikan dengan minyak kedelai, terutama untuk beberapa produk. Misalnya, margarin tidak bisa dibuat dari minyak kedelai karena secara kesehatan justru dilarang sebab dapat menyebabkan kanker. Selain itu juga, beberapa produk dari *oleo chemical* minyak sawit juga tidak bisa digantikan minyak nabati lainnya sehingga jika minyak sawit tetap dibutuhkan pasar AS.

"Minyak kelapa sawit menjadi bahan utama industri pangan di Amerika, seperti margarin, yang tidak bisa digantikan oleh minyak nabati

Minyak sawit juga tidak bisa digantikan minyak nabati lainnya sehingga jika minyak sawit tetap dibutuhkan pasar AS.

lain karena isu kesehatan seperti lemak trans dari kedelai," katanya.

Menurut Eddy Martono, dalam konteks pemenuhan minyak nabati, pasar AS sebenarnya akan mengalami kerugian dengan kebijakan tarif impor 32 persen. Harga minyak sawit akan melonjak, namun tidak dapat digantikan dengan minyak nabati lainnya sebagai bahan baku utama produk makanan mereka. Namun, posisi Indonesia justru dirugikan karena Malaysia sebagai pesaing Indonesia di pasar CPO Amerika hanya dikenakan tarif 24%.

Beban pengusaha sawit di Indonesia semakin berat karena adanya kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO), Pengutan Ekspor (PE), dan Bea Keluar (BK) dengan jumlah total mencapai USD 221 per metrik ton. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya USD 140 per ton. Kondisi ini sudah pasti membuat daya saing minyak sawit Indonesia kurang kompetitif. Belum lagi, tantangan logistik yang harus ditanggung pengusaha sawit di Indonesia karena pengiriman dari Malaysia lebih dekat.

Dalam pandangan GAPKI, pemerintah perlu menempuh langkah strategis untuk menjaga kontribusi sawit terhadap devisa



negara terjaga. Hasil diskusi dan masukan GAPKI kepada Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan memberikan sinyal positif di mana pemerintah akan meninjau pungutan ekspor (PE) sebagai langkah jangka pendek untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia.

Selain langkah jangka pendek menurunkan beban ekspor, langkah jangka panjang juga harus ditempuh yakni meningkatkan produktivitas. Salah satu upaya yang sedang dilakukan antara lain melalui penggunaan serangga penyerbuk dari Tanzania dan penggunaan pupuk hayati untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia impor. Perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar sangat berpengaruh pada harga pupuk kimia dengan bahan baku impor.

Untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika, GAPKI mendorong diversifikasi pasar, terutama mengantisipasi kemungkinan perang dagang lanjutan yang mempengaruhi pasar lain seperti China dan Uni Eropa. Kawasan lain seperti Amerika Latin dan Afrika adalah alternatif yang paling mungkin dijajaki. Salah satu langkah konkret perluasan pasar adalah misi dagang ke Mesir pada Mei 2025 nanti.

Reaksi melalui langkah positif terhadap kebijakan Amerika Serikat tentunya harus dibarengi dengan antisipasi terhadap dinamika global. Terutama potensi risiko resesi global yang bisa menekan permintaan ekspor secara umum. "Reaksi terhadap kebijakan Amerika Serikat harus diimbangi dengan antisipasi terhadap potensi risiko resesi global," katanya.

Langkah cepat yang diambil pemerintah dan dukungan kepada industri sawit membuat GAPKI optimistis Indonesia mampu mempertahankan bahkan meningkatkan ekspor minyak sawit ke Amerika Serikat. Salah satu hal yang membuat keyakinan ini kuat antara lain minyak sawit belum tergantikan oleh minyak nabati lain



untuk kebutuhan pangan di negeri Paman Sam.

Sementara itu, Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani mengatakan kebijakan tarif impor yang diambil Amerika Serikat mesti dimanfaatkan sebagai momentum untuk

memperkuat hilirisasi industri sawit, meningkatkan penetrasi ke pasar selain Amerika Serikat dan mempercepat transisi dari ekspor bahan mentah ke produk turunan bernilai tambah seperti oleokimia dan bioenergi. ■

KEPADA DPR, GAPKI MINTA BEBAN EKSPOR CPO DIKURANGI

Pasar Amerika cukup bagus karena ada produk yang harus pakai minyak sawit.



GAPKI meminta beban ekspor minyak kelapa sawit dikurangi agar dapat bersaing dengan Malaysia dan mengantisipasi tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump. Permintaan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi VII DPR di Jakarta pada 28 April 2025. Rapat ini juga diikuti oleh asosiasi komoditas lain yang berorientasi ekspor.

Indonesia merupakan produsen, konsumen, dan eksportir CPO terbesar di dunia. Dengan adanya tarif resiprokal dari Amerika Serikat, tarif resiprokal Indonesia 32%. Sedangkan Malaysia hanya 24%, lebih rendah 8% dibanding Indonesia.

Akibatnya harga CPO Indonesia di pasar Amerika lebih mahal dibandingkan CPO Malaysia. Artinya, minyak sawit Indonesia kurang kompetitif dibandingkan produk

serupa dari Malaysia.

Selain itu, ada beban ekspor yang ditanggung pengusaha. Untuk setiap ton ekspor CPO, ada pengutan ekspor, bea keluar, dan *Domestic Market Obligation* (DMO). Total beban ekspor mencapai US\$ 221 atau setara Rp 3,7 juta per ton. Sedangkan di Malaysia, beban ekspor di kisaran US\$ 140 atau setara Rp 2,35 juta. Beban ekspor dan tarif resiprokal yang membuat harga minyak sawit Indonesia kalah kompetitif dibandingkan produk Malaysia.

Dalam kesempatan ini GAPKI menegaskan pentingnya menjaga ekspor CPO karena memiliki dampak luas. Jika ekspor terhambat, pasokan dalam negeri banjir yang memicu masalah lain seperti tekanan harga. Saat ini, produksi minyak sawit 50 juta ton/ tahun. Untuk kebutuhan pangan 10 juta ton, industri oleokimia 2,5 juta ton, program biodiesel 11-13 juta ton. Total kebutuhan dalam negeri 25

juta ton. Dari ekspor CPO, devisa yang masuk mencapai US\$ 30 miliar atau setara 505 triliun.

Menurut Mukti Sardjono, saat ini ekspor CPO Indonesia mencapai 30 juta ton/ tahun. China menjadi tujuan ekspor terbesar yang pernah mencapai 7 juta ton/tahun. Saat ini ekspor ke China turun di kisaran 5,5 juta ton. Selain China, ekspor CPO juga mengalir ke India 4,8 juta ton, Uni Eropa 3,3 juta ton, Pakistan 3 juta ton, dan AS sekitar 2,5 juta ton. Pasar Amerika cukup bagus karena ada produk yang harus pakai minyak sawit.

Salah satu contoh adalah produk ayam goreng terkenal dari Amerika. Makanan ini hanya bisa mencapai titik renyah (*crispy*) kalau digoreng dengan minyak sawit. Rasanya juga lebih gurih dan enak. Kalau digoreng dengan minyak nabati selain sawit, ayam goreng ini tidak bisa renyah dan rasanya tidak se enak digoreng dengan minyak sawit. ■





GAPKI OPTIMISTIS EKSPOR CPO KE RUSIA TEMBUS 1 JUTA TON

Kalau dibandingkan dengan ekspor tahun 2023, jumlahnya meningkat sekitar 13%.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono optimistis ekspor minyak sawit mentah (*crude palm oil*) Indonesia ke Rusia bisa mencapai 1 juta ton. Sikap optimistis ini didasari pada hasil ekspor minyak sawit mentah ke Rusia pada tahun 2024 yang mencapai 680.000 ton. Optimisme ini disampaikan Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam *Forum Bisnis Rusia-Indonesia* di Hotel Raffles, Jakarta pada 14 April 2025.

Kinerja ekspor CPO ke Rusia hingga 680.000 ton itu menunjukkan grafik peningkatan yang cukup bagus. Sebab, kalau dibandingkan dengan ekspor tahun 2023, jumlahnya meningkat sekitar 13%. Berdasarkan perkembangan pasar ini, GAPKI menargetkan nilai ekspor minyak sawit dari Indonesia ke Rusia menembus nilai 1 juta ton. Target itu diharapkan dapat tercapai dalam waktu dekat.

Selama ini, minyak sawit yang diekspor ke Rusia masih berbentuk minyak sawit olahan atau *refined palm oil*, yakni produk turunan kelapa sawit yang dihasilkan dari proses pemurnian CPO.

Minyak kelapa sawit di Rusia memiliki



pesaing, yaitu minyak bunga matahari. Namun, minyak sawit masih menjadi primadona di Rusia, khususnya di industri makanan. Selain faktor rasa dan kesehatan, harga minyak sawit lebih kompetitif dibandingkan pesaingnya. Forum Bisnis Indonesia-Rusia diharapkan meningkatkan peluang usaha bagi pelaku bisnis sawit di Indonesia. Pertemuan dengan para pemangku kepentingan Rusia diharapkan dapat mempererat kerja sama Indonesia dan Rusia dalam perdagangan minyak kelapa sawit. Selain itu, GAPKI berharap Rusia dapat berperan sebagai hub ekspor ke negara tetangga, terutama yang tidak memiliki kelapa sawit, seperti

Uzbekistan, Pakistan, dan Tajikistan.

Forum Bisnis Indonesia-Rusia diprakarsai oleh kedua negara dengan tajuk Roscongress International Business Forum. Sejumlah pembicara dijadwalkan akan membahas kerja sama perekonomian kedua negara. Acara ini turut melibatkan Pusat Ekspor Rusia (REC).

Forum ini juga mempertemukan lebih dari 30 perusahaan Rusia, termasuk produsen solusi digital, produk makanan, peralatan khusus, dan industri lainnya. Forum ini diselenggarakan oleh Yayasan Roscongress di bawah merek Roscongress International dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. ■

SOLUSI KEBUN SAWIT DALAM KAWASAN HUTAN HARUS ADIL

Perlunya melihat kembali sejarah perizinan perusahaan yang lahannya masuk dalam kawasan hutan.

Ketua Koperasi Melati, Sabarani kaget bukan main ketika Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memasang plang sita di kebun sawit milik koperasi plasma yang bermitra dengan PT WYKI di Sampit, Kalimantan Tengah. Sejak kebun itu disita, anggota koperasi tidak diizinkan memanfaatkan lahan yang menjadi sumber pendapatan mereka. Sumber pendapatan warga anggota koperasi otomatis terhenti. Bersama pengurus koperasi lainnya yang mengalami kejadian serupa, Sabarani mengadu ke DPRD Kotawaringin Timur.

Penyitaan

tidak hanya menimpa lahan milik koperasi, tapi juga perusahaan. Pada 7 Maret 2025, Satgas PKH mengerahkan 50 personel TNI ke lahan empat perusahaan sawit di Sampit. Selain memasang plang sita, mereka juga melakukan patroli, serta mengamankan dan mengecek titik koordinat area kebun yang masih dalam proses perizinan atau ditolak usulannya oleh Kementerian Kehutanan. Di daerah lain, Satgas PKH melakukan hal serupa.

Satgas PKH memang bergerak cepat setelah Menhut Raja Juli Antoni menerbitkan SK No. 36 Tahun 2025 yang mencatat 436 perusahaan sawit yang lahannya masuk kawasan hutan. Daftar ini

menjadi dasar bagi Satgas menyegel dan menyita ribuan hektare lahan sawit di Kalimantan Tengah. Penyitaan ini mengagetkan banyak pihak karena dampaknya terhadap perekonomian negara secara umum dan industri sawit secara khusus.

Selama ini, kontribusi sektor sawit terhadap APBN signifikan. Merujuk data 2023, kontribusi sawit terhadap APBN mencapai Rp 88 triliun yang terdiri dari pajak Rp 50,2 triliun, PNBP Rp 32,4 triliun, dan Bea Keluar Rp 6,1 triliun. Selain itu, industri sawit juga menyerap 16 juta tenaga kerja dan 2,4 juta petani. Karena itu, penyitaan lahan dikhawatirkan berdampak pada ketahanan pangan dan energi sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dampak penyitaan lahan sawit mulai terlihat di Sampit. Seperti diberitakan *Radar Sampit* edisi 22 Maret 2025, sawit di lahan sitaan dipanen orang tak dikenal.



Peristiwanya terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Sampit di mana hasil panen sawit diangkut dengan truk-truk oleh orang tak dikenal. Kondisi ini juga sudah dilaporkan kepada DPRD Kota Waringin Timur agar lahan sawit yang disita dapat dijamin keamanannya.

Dampak lainnya adalah tidak ada kejelasan penanggung jawab operasional lahan sitaan ini. Komandan Satgas Garuda Mayjen TNI Yusman Madayun menegaskan lahan sitaan berjalan seperti biasa. Tim transisi disiapkan untuk menjamin hak-hak pekerja terpenuhi. Peralihan pengelolaan lahan ke manajemen baru diharapkan tidak menimbulkan gejala.

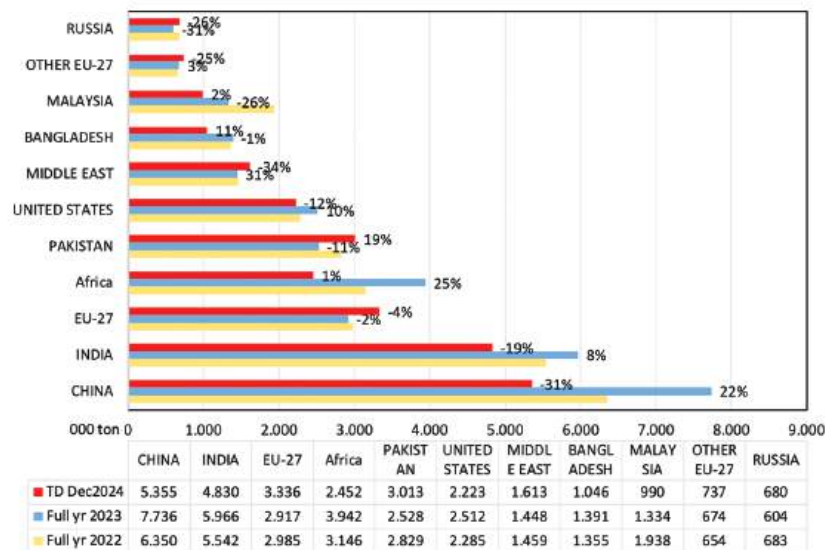
Potensi dampak sosial ini menjadi perhatian pakar hukum kehutanan Universitas Al Azhar Indonesia, Dr. Sadino. Sebab, pemasangan plang penguasaan sebelum status lahan jelas justru menimbulkan persoalan baru.

Perusahaan kehilangan kepastian hukum atas lahan yang sudah disita. Namun, status lahan yang disita ini belum dijelaskan sehingga Satgas PHK harus menjelaskan kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dr. Sadino mengatakan Satgas PHK seharusnya tidak sampai menghambat produksi dan keberlanjutan industri sawit. Apalagi langkah Satgas dinilai bertentangan dengan Pasal 110A dan 110B UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Jika lahan dengan izin HGU tetap disita, investor akan kehilangan kepercayaan dan menarik diri dari sektor perkebunan. Selain itu, status hukum Satgas juga masih bisa diperdebatkan.

Menurut Dr. Sadino, lahan sawit yang masih dalam proses perizinan harus didukung hingga ada penyelesaian resmi. Pasalnya,

EXPORT CHANGES TO MAJOR DESTINATIONS



HGU dan kebun sawit kerap menjadi agunan kredit bank. Apalagi lahan kebun sawit berbeda dengan tambang. Apabila tidak dikelola dengan baik, hasil panen bisa rusak dan produksinya menurun drastis. Sedangkan tambang, meskipun dipasang plang larangan, kandungan mineralnya tetap ada dan tidak berpindah tempat.

GAPKI sebagai organisasi pengusaha sawit sepakat dengan pembenahan tata kelola industri sawit yang harus dilakukan agar tidak berlarut.

Namun, pembenahan harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menjadi hambatan bagi keberlangsungan industri sawit. Dunia usaha butuh kepastian hukum tentang tumpang tindih lahan agar aman dan nyaman berinvestasi. Jaminan keamanan inilah yang membuat mereka berkontribusi maksimal untuk negara.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono

mengatakan perlunya melihat kembali sejarah perizinan perusahaan yang lahannya masuk dalam kawasan hutan. Keadilan harus ditegakkan dengan melihat apakah pada saat izin dikeluarkan sudah ada tata ruang yang jelas.

Kalau sudah ada, maka tata ruang itu perlu dikaji ulang untuk memastikan apakah izin yang diterbitkan saat itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga penyelesaiannya adil.

Eddy Martono menegaskan anggota GAPKI memiliki komitmen yang tinggi memenuhi setiap kewajiban antara lain pembayaran denda sesuai Pasal 110A. Sementara untuk Pasal 110B, belum ada tagihan resmi sampai saat ini. Namun, GAPKI berharap kewajiban pembayaran denda, nominal yang ditetapkan harus wajar dan mempertimbangkan kemampuan industri agar sektor sawit tetap dapat berjalan dan berkontribusi bagi negara. ■





MEMPERKUAT KOMITMEN PERLINDUNGAN PEKERJA SEKTOR SAWIT

Pasar internasional mendorong produk sawit berasal dari praktik yang bertanggung jawab baik secara lingkungan maupun sosial.

Komitmen industri sawit di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dilakukan di banyak sektor antara lain masalah ketenagakerjaan. Penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak pekerja dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, GAPKI berada di garis terdepan mengawal kepatuhan terkait hak-hak pekerja. Salah satu terobosan yang dilakukan GAPKI adalah membangun dialog konstruktif bersama JAPBUSI dalam *platform* Jaga Sawitan (Jaringan Ketenagakerjaan untuk Sawit Berkelanjutan).

Dalam usianya yang kedua, Jaga Sawitan menyelenggarakan *Refleksi 2 Tahun Jaga Sawitan Dialog Pemangku Kepentingan: Buruh dalam Tata Kelola Sawit Berkelanjutan* di Hotel Ashley, Jakarta pada 25 Februari 2025. Refleksi ini disampaikan narasumber antara lain Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPA Desy Andriani, Perencana Ahli Madya Bappenas Gayatri Waditra Nirwestri, Kabid Pengembangan SDM GAPKI Sumarjono Saragih, dan Sekretaris Eksekutif JAPBUSI Nursanna Marpaung.

Jaga Sawitan adalah wadah kerjasama antara perusahaan dan serikat buruh yang dideklarasikan oleh GAPKI dan JAPBUSI pada 16

Februari 2023. Forum ini bertujuan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dan produktif melalui dialog sosial yang kuat. Jaga Sawitan mendorong peningkatan citra sawit Indonesia dengan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara efektif dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja. Salah satu fokus utamanya adalah perlindungan pekerja perempuan dan pencegahan pekerja anak di sektor sawit.

Presidensi Jaga Sawitan, Nursanna Marpaung mengatakan komoditas sawit menjadi salah satu sektor utama yang menjadi unggulan bagi pemerintah. Tak hanya dalam menciptakan lapangan kerja, namun juga memenuhi kebutuhan pangan dan energi melalui peningkatan program B40, maupun berbagai produk lainnya yang menjadi bahan baku ekspor dan kebutuhan domestik. Di sisi lainnya pasar internasional mendorong produk sawit yang dihasilkan berasal dari praktik yang bertanggung jawab baik secara lingkungan maupun sosial.

Menurut Kabid Pengembangan SDM GAPKI Sumarjono Saragih, kehadiran Jaga Sawitan cukup efektif untuk membangun citra positif sawit, terutama

dalam aspek ketenagakerjaan. Isu-isu pekerja yang menjadi perhatian global menjadi salah satu *concern* Jaga Sawitan mendorong kepatuhan industri sawit terkait hak-hak pekerja. Dialog konstruktif yang dibangun melalui wadah ini menjadi contoh industri lain dalam membangun dialog dengan serikat pekerja.

Jaga Sawitan mendorong pengembangan sistem kepatuhan sosial yang terintegrasi mulai dari pelaksanaan, pemantauan, dan pelaksanaan aksi pencegahan dan perbaikan di tingkat perusahaan sampai remediasi di tingkat nasional. Dialog yang dibangun di kegiatan refleksi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kunci terkait isu-isu perlindungan pekerja perempuan hingga penghapusan pekerja anak di rantai pasok kelapa sawit. ■





PANEN JAGUNG PERDANA KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

Panen raya jagung perdana di Kabupaten Madiun ini mencakup lahan seluas 1.438 hektar.

Sebagai organisasi yang telah berkomitmen mendukung program ketahanan pangan dan energi yang dijalankan oleh pemerintah, GAPKI selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan energi. Kegiatan yang dihadiri GAPKI tidak hanya seremoni penanaman atau panen raya, namun juga menjalankan program seperti tumpang sari tanaman pangan di kebun sawit.

Salah satu kegiatan yang GAPKI turut berpartisipasi adalah Panen Raya Jagung Serentak di Desa Bulu, Pilangkenceng, Kabupaten Madiun Jawa Timur pada 26 Februari 2025. Panen ini merupakan panen raya perdana penanaman jagung untuk program ketahanan pangan yang

dikoordinasi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam kegiatan ini, GAPKI diwakili oleh Ketua Bidang Perkebunan R. Aziz Hidayat.

Panen raya perdana jagung serentak ini dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Panen jagung ini dirayakan oleh kurang lebih 350 orang yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Forkopimda, dan tentu saja para petani. Kabupaten Madiun menjadi daerah pertama yang melakukan panen jagung dalam program ketahanan pangan nasional.

Panen raya jagung perdana di Madiun ini mencakup lahan seluas 1.438 hektar yang selama ini masuk dalam program ketahanan pangan yang dikoordinir oleh Polri. Dengan luas lahan ini total jagung yang dipanen diperkirakan mencapai 7.191 hingga 14.383 ton. Pemerintah menargetkan produksi jagung sepanjang tahun 2025 sebanyak 20



juta ton untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan ketahanan pangan dan energi adalah titik awal pencapaian Indonesia Emas tahun 2045. Ketahanan pangan berfokus pada kesiapan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri karena masing-masing negara saat ini semakin menahan ekspor komoditas pangannya. Karena itu, komoditas pangan menjadi alat strategis pertahanan negara.

Di sisi lainnya, ketahanan pangan melalui swasembada pangan yang sedang dikembangkan oleh pemerintah juga untuk menjamin program makan bergizi gratis dapat berjalan lancar dan bahan baku pangan terpenuhi dari produksi dalam negeri. ■



POTENSI RBDPKO SEBAGAI BAHAN BAKU UTAMA SAF

Pemerintah telah menyusun peta jalan SAF di Indonesia, namun regulasi implementasinya belum tersedia.

Indonesia memiliki banyak tanaman yang berpotensi menghasilkan minyak nabati sebagai bahan baku campuran avtur untuk bahan bakar pesawat udara. Beberapa tanaman yang memiliki potensi dikembangkan sebagai bahan baku *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) antara lain kelapa, nyamplung, dan kosambi selain kelapa sawit yang selama ini menjadi bahan baku utama produksi SAF.

Hal ini terungkap di dalam *Forum Group Discussion Life Cycle Assessment (LCA) Produksi Sustainable Aviation Fuel Berbasis Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil* di Hotel Harris, Surakarta pada 19 Februari 2025. FGD ini diadakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Tim Riset Program Studi Teknik Kimia Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan PT Kilang Pertamina Internasional serta BDPKS.

FGD yang dihadiri Ketua Bidang Agro Industri GAPKI, Rapolo Hutabarat ini bertujuan untuk mendiskusikan hasil riset terkini tentang potensi RBDPKO sebagai bahan baku utama dalam produksi SAF yang ramah lingkungan dan mendukung transisi energi berkelanjutan. Melalui pendekatan LCA, tim riset memaparkan analisis menyeluruh mengenai dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial dari produksi SAF

berbasis RBDPKO.

Dalam FGD ini, peneliti dari Teknik Kimia dan LPPM UNS serta perwakilan berbagai instansi terkait seperti Kemenhub, Kementerian ESDM, BKKPIL, PT Kilang Pertamina Internasional, Garuda Indonesia, dan Teknik Kimia ITB memaparkan hasil analisisnya. Diskusi ini berfokus pada tantangan dan peluang dalam mengoptimalkan produksi SAF berbasis RBDPKO dan implikasinya terhadap pencapaian target Net Zero Emission (NZE) di sektor penerbangan.

Keragaman narasumber dalam FGD ini sangat bermanfaat bagi pengembangan produksi SAF. Sebab, acara ini menjadi wadah kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah untuk mendorong inovasi dalam pengembangan bahan bakar ramah lingkungan. FGD ini menghasilkan beberapa rekomendasi strategis bagi pengembangan SAF di Indonesia serta memperkuat peran riset dalam mendukung kebijakan energi berkelanjutan.

Beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan FGD ini antara lain pemerintah telah menyusun peta jalan SAF di Indonesia, namun regulasi implementasinya belum tersedia. Padahal PT Kilang Pertamina Internasional mampu memproduksi SAF dan telah diuji



terbang pada pesawat komersil dengan komposisi pencampuran 2,4%. Selain itu, RBDPKO terbukti menjadi sumber bahan baku utama produksi SAF.

Tema yang masih menjadi kajian lanjutan adalah pengukuran nilai *SAF Life Cycle Emission Based on Feedstock and Minimum Emission Reduction* dari berbagai bahan baku yang digunakan untuk mendapatkan nilai yang lebih akurat sebagai pedoman pengembangan SAF di masa depan. ■



KESEKRETARIATAN KUNCI GAPKI MEWUJUDKAN VISI DAN MISINYA

GAPKI telah menjadi organisasi rujukan industri sawit di Indonesia dan mancanegara.

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) semakin luas tidak hanya untuk otomasi di manufacture, namun juga pengelolaan organisasi. Pekerjaan rutin dan berulang, kini dapat ditangani oleh AI dengan kemampuan algoritmanya. AI juga meningkatkan kompetensi SDM organisasi untuk menghasilkan kinerja terbaik. Pembahasan AI menjadi satu materi *Workshop Sekretariat Pusat-Cabang GAPKI* di The Singhasari Resort Hotel, Batu, Jawa Timur pada 11-14 Februari 2025.

Workshop yang diikuti oleh Sekretariat GAPKI Pusat dan 15 GAPKI Cabang ini merupakan yang ketiga setelah tahun 2022 dan 2023. Pelatihan ini sangat penting mengingat peran sekretariat yang vital dalam membantu pengurus GAPKI menjalankan roda organisasi. Apalagi GAPKI telah menjadi organisasi rujukan industri sawit di Indonesia dan mancanegara. Di sisi lain, tantangan di masa depan semakin besar sehingga Sekretariat



GAPKI harus mampu beradaptasi dengan teknologi yang dapat membantu kinerjanya.

Selain personel sekretariat, *workshop* ini juga dihadiri oleh pengurus GAPKI antara lain Wakil Ketua Umum I, Wakil Ketua Umum III, Wakil Sekjen, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, Kabid Organisasi, dan Ketua GAPKI Cabang di seluruh Indonesia. Sekjen GAPKI M. Hadi Sugeng memaparkan materi *Tata Kelola Administrasi/Organisasi GAPKI* sebagai pengantar tentang GAPKI, aturan terbaru dalam organisasi yang harus diketahui oleh personel sekretariat di sekretariat GAPKI pusat maupun cabang.

Sebagai organisasi dengan 700 perusahaan lebih sebagai anggota, GAPKI adalah organisasi sawit terbesar di dunia. Karena itu, kesekretariatan harus dilakukan profesionalisme sebagai cermin kebesaran organisasi. Kelancaran koordinasi antara cabang, pihak eksternal, maupun antar anggota dan pengurus semua bermuara pada peran sekretariat. Karena itu,

kompetensi SDM Sekretariat GAPKI Pusat-Cabang harus dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi.

GAPKI memiliki 15 cabang dengan manajemen kesekretariatan di Kantor Pusat dipimpin oleh Direktur Eksekutif. Di setiap kantor cabang, kesekretariatan dikelola oleh seorang Sekretaris Eksekutif meskipun ada beberapa cabang yang belum memiliki Sekretaris Eksekutif maupun staf sekretariat. Setiap sekretariat diisi oleh karyawan yang menjalankan fungsi kesekretariatan dalam organisasi. Sekreariat berperan besar dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Dengan peran vital ini, personel sekretariat dibekali dengan keterampilan teknis pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dan kemampuan kepemimpinan, terutama kecepatan berpikir dalam pengambilan keputusan. Dalam *workshop* ini, materi tentang AI disampaikan oleh Dr. Baiq Hana Susanti, Direktur Artificial Intelligence Center Indonesia. Sedangkan tema *Proactive Leadership Training* dipaparkan oleh Joko Kurniawan, Trainer Kemilau Cahaya Inspirasi Malang. Untuk meningkatkan kekompakan personel sekretariat, *workshop* di dalam ruangan dilakukan dengan *outbound* dan *team building*. Kegiatan di alam terbuka ini tidak hanya membangun keakraban, namun juga spirit kebersamaan dan semangat berkembang bersama. ■



JAGA KESEIMBANGAN EKSPOR, PANGAN, DAN BIOFUEL

Kebijakan ini membatasi daya saing minyak sawit karena harga domestik lebih rendah dari harga pasar global.

Menjaga keseimbangan antara ekspor, konsumsi pangan, dan biofuel merupakan prioritas utama yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri sawit dalam negeri. Pentingnya keseimbangan ini disampaikan oleh Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI, M. Fadhil Hasan dalam *36th Palm & Lauric Oils Price Outlook Conference & Exhibition (POC 2025)* di Shangri-La, Kuala Lumpur, 24-26 Februari 2025. Fadhil Hasan menyampaikan materi berjudul *Government Policy on Palm Oil Industry: Implication and Outlook 2025*.

Dalam POC Malaysia 2025 ini, GAPKI mengirim delegasi antara lain Ketua Umum Eddy Martono, Ketua dan anggota Dewan Pembina Joe fly J. Bahroeny dan Joko Supriyono, Bendahara Mona Surya, Ketua GAPKI Kalteng Syaiful Panigoro, Ketua GAPKI Kaltara Hendra Lintung, dan Sekretariat GAPKI Susila Darma Wati dan Susan Sri Rahayu. GAPKI mendapat kepercayaan sebagai salah satu pemateri dalam konferensi internasional ini.

Menurut Fadhil Hasan, industri sawit Indonesia menghadapi tantangan akibat peningkatan serapan minyak kelapa sawit untuk kebutuhan program biodiesel yang ditingkatkan dari 35% menjadi 40% pada Februari 2025. Apalagi target pencampuran berikutnya adalah 50% atau B50 pada 2026. Dalam kebijakan ini, pemerintah membagi subsidi hanya untuk biofuel dalam kategori *Public Service Obligation* (PSO). Sementara *non-PSO* mengikuti harga pasar.

Peningkatan pencampuran minyak



sawit ini tentu berdampak pada peningkatan konsumsi domestik yang pesat. Padahal produksi minyak sawit belum mampu mengejar kebaikan konsumsi biodiesel. Apalagi dalam lima tahun terakhir, produksi sawit stagnan dan bahkan ada kecenderungan menurun. Akibatnya ekspor minyak sawit diprediksi turun dari 32,2 juta ton (2023) menjadi 27,3 juta ton pada 2025 karena alokasi lebih besar untuk biodiesel. Nilai ekspor sawit turun dari USD 36 miliar pada 2024 menjadi USD 27 miliar pada 2029.

Penurunan volume ekspor minyak sawit memiliki dampak besar terhadap program lainnya, terutama pendanaan program biofuel dan bagi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Selama ini, BPDP mengandalkan pemasukan dari pungutan ekspor minyak kelapa sawit yang digunakan untuk berbagai kepentingan industri sawit. Belakangan, komoditas yang menjadi tanggung jawab BPDP justru ditambah dengan kelapa dan kakao.

Dalam pandangan GAPKI, tantangan industri sawit ke depan semakin besar. Apalagi apabila dikaitkan dengan

kebijakan *Domestik Market Obligation* (DMO) untuk minyak goreng. DMO tetap diterapkan untuk memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri dan menstabilkan harga. Skema DMO disesuaikan dengan peningkatan batas harga minyak goreng domestik menjadi Rp 15.700/liter dan target volume DMO dikurangi menjadi 250.000 ton/bulan.

Kebijakan ini membuat daya saing minyak sawit terbatas karena harga domestik lebih rendah dari harga pasar global. Padahal, di pasar global harga minyak sawit bersaing ketat dengan minyak nabati lain yang dikhawatirkan sama atau lebih rendah. Pasokan CPO di pasar global yang terbatas tentu saja menurunkan daya saing. Harga minyak sawit pada 2025 diperkirakan di kisaran USD 975-1050 (CIF Rotterdam), lebih rendah dibanding 2024.

GAPKI mendorong pemerintah menyeimbangkan implementasi kebijakan DMO, biodiesel B40/B50 karena berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia, terutama industri sawit itu sendiri. Kebijakan biodiesel bermanfaat bagi ketahanan

dan kemandirian energi nasional. Karena itu, menjaga keseimbangan antara ekspor, konsumsi pangan, dan biofuel harus dilakukan di tengah produksi sawit yang stagnan. Peningkatan produktivitas melalui replanting menjadi kunci untuk menjaga daya saing minyak sawit di pasar global.

Peremajaan sawit sebagai faktor kunci peningkatan produktivitas juga disampaikan oleh Menteri Perdagangan dan Komoditi Malaysia, Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Sepanjang 2024, Malaysia hanya meremajakan 2% atau 114.000 hektar kebun sawit. Pada 2025, target peremajaan naik menjadi 4%-5% atau setara 285.000 hektar untuk menjaga produktivitas tanpa ekspansi lahan. Datuk Seri Johari Abdul Ghani menegaskan peremajaan adalah hal mutlak yang harus dilakukan Malaysia untuk mencegah penurunan produksi.

Thomas Mielke dari ISTA Mielke GMBH juga menyoroti penurunan ekspor minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia sejak 2019. Penurunan produksi akibat usia tanaman yang menua dan peremajaan yang sedang berjalan menjadi salah satu pemicunya. Kebijakan pemerintah Indonesia tentang biodiesel juga berperan



dalam penurunan ekspor ini. Persaingan harga minyak sawit dan minyak nabati lain meningkat dan selisihnya makin hari makin tipis.

Harga minyak sawit sangat volatil dalam beberapa tahun terakhir, dengan pergerakan besar antara USD 530 pada 2020 hingga USD 1900 pada 2022. Dia memprediksi harga CPO pada 2025 mengalami penurunan premium dibandingkan minyak kedelai dan minyak bunga matahari. Minyak bunga matahari dan minyak rapeseed naik tajam dan menarik permintaan dari minyak sawit. Peningkatan

produksi sawit dari Indonesia dan Malaysia diharapkan bisa segera terwujud akan keseimbangan pasokan pasar global lebih terjamin.

Pentingnya pasokan minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia juga disampaikan beberapa pakar lain yang menghadiri POC 2025 Malaysia antara lain Abdul Rasheed Jan Mohammad (CEO Wetsbury Group), Rahul Kale (Group Head - Oleochemicals and Biofuels, Wilmar International Limited), Dorab Mistry (Godrej International Limited) dan lain-lainnya. ■



DPD INVENTARISIR MASALAH INDUSTRI SAWIT

Masalah ini tantangan besar industri sawit menjalankan usahanya dan meningkatkan produktivitasnya.

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum GAPKI Muchtar Tanong menyampaikan beberapa masalah krusial di perkebunan sawit, termasuk komitmen menerapkan sawit berkelanjutan. Masalah ini disampaikan dalam pertemuan dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Medan, pada 3 Maret 2025 yang dihadiri oleh 60 orang perwakilan pemangku kepentingan sawit. Dalam dialog ini GAPKI diwakili oleh Muchtar Tanong dan Ketua Bidang Perkebunan R. Aziz Hidayat.

Dalam dialog ini, Ketua Komite II Badikenita Sitepu, Waka Komite II A. Waris Halid, dan anggota Komite II La Nyalla Mattaliti, Bustami, Abdul Hamid, dan Darma Husain ingin menggali problem dalam penerapan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. DPD mau mendengar langsung kendala di lapangan sebagai bahan merumuskan solusi terbaik. Beberapa masalah krusial yang terungkap bermuara pada masalah perizinan kebun sawit.

Sesuai laporan Pemrov Sumatera Utara, masalah yang terjadi di industri kelapa sawit antara lain tumpang tindih perizinan dan ketidaksesuaian pemahaman regulasi, IUP yang tidak dilaporkan kepada



kementerian pertanian, koordinasi antar instansi yang kurang efektif, penerbitan surat tanda daftar budidaya usaha di bawah 25 hektar, pengawasan dan pengendalin yang belum optimal. Masalah-masalah ini menjadi tantangan besar bagi industri sawit dalam menjalankan usahanya dan meningkatkan produktivitasnya.

Muchtar Tanong mengamini masalah yang disampaikan oleh Pemrov Sumatera Utara. Apalagi problem ini tidak hanya terjadi di Sumatera Utara, namun juga di daerah penghasil komoditas sawit lainnya. Banyaknya instansi yang mengurus komoditas sawit membuat koordinasi kurang efektif dan berdampak pada perbedaan pemahaman tentang regulasi. Akibatnya potensi besar sektor sawit belum dapat dioptimalkan karena terkendala masalah birokrasi ini.

Selain masalah perizinan, industri sawit juga menghadapi tantangan lainnya seperti kewajiban mencantumkan label halal pada minyak mentah sawit. Kementerian Agama sudah

memaparkan label halal kepada GAPKI sejak tahun lalu. Dalam pandangan GAPKI, label halal lebih pas untuk produk turunan kelapa sawit karena prosesnya menyertakan unsur dari luar. Sedangkan minyak mentah sawit prosesnya steril dari unsur dari luar dan tidak ada campuran apapun.

Untuk menyelesaikan masalah di atas, GAPKI sepakat dengan usulan berbagai kalangan tentang pentingnya badan sawit. Apalagi Ombudsman RI juga menyarankan pembentukan badan sawit untuk mengantisipasi potensi maladministrasi tata kelola perkebunan kelapa sawit. Keberadaan badan sawit diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pendapatan Rp 279,1 triliun dengan cara membenahi tata kelola industri sawit melalui badan sawit.

Dalam dialog ini, DPD berencana mengundang kembali pemangku kepentingan industri sawit untuk pembahasan lebih komprehensif terkait industri sawit dari hulu hingga hilir. ■



DPR PANTAU PERKEMBANGAN PSR DAN HILIRISASI PRODUK SAWIT

GAPKI mendapatkan tugas menjalankan PSR jalur kemitraan di lahan seluas 3.550 hektar.

Perkembangan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan rencana hilirisasi produk sawit menjadi salah satu perhatian Komisi VII DPR. Untuk mengetahui lebih jauh perkembangan terkini, Komisi VII DPR mengadakan kunjungan ke Medan, Sumatera Utara. Kunjungan ini juga untuk mendapat informasi dari pelaku industri sawit milik negara dan swasta. Dalam kegiatan pada 10 April 2025, GAPKI diwakili oleh Ketua Bidang Perkebunan, R. Aziz Hidayat.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII Saleh Partaonan Daulay mengatakan agenda ini dalam rangka berbagi pandangan, dan menyusun langkah strategis demi penguatan sektor kelapa sawit nasional. Sebab, sektor sawit bukan hanya menjadi tulang punggung ekonomi bangsa, tetapi juga harapan bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pandangan DPR, *replanting* adalah salah satu kunci keberlanjutan industri kelapa sawit yang tidak hanya berfokus pada regenerasi sawit dengan bibit unggul, tetapi juga menempatkan kolaborasi antara

perusahaan dan petani sebagai fondasi utama. Karena itu, Komisi VII DPR mendukung penuh upaya percepatan replanting melalui skema kemitraan yang melibatkan perusahaan, koperasi, dan masyarakat.

Program PSR melalui jalur kemitraan sudah dijalankan oleh GAPKI sejak dua tahun yang lalu. Dalam program percepatan PSR melalui jalur kemitraan ini, GAPKI mendapatkan tugas menjalankan PSR jalur kemitraan di lahan seluas 3.550 hektar. Sedangkan PalmCo seluas 5.000 hektar, SupportingCo seluas 10.000 hektar, Apkasindo 67.400 hektar, dan Aspekpir 5.013 hektar.

Menurut Saleh Saulay, keberhasilan program *replanting* memerlukan sinergi, baik dari sisi pendanaan, teknis, maupun pendampingan kepada para petani. Diharapkan kerja sama yang telah dirintis dapat terus diperkuat demi tercapainya produktivitas yang optimal dan kesejahteraan yang merata.

Komisi VII mendorong agar produk turunan kelapa sawit tidak hanya minyak goreng namun, dapat



melangkah lebih jauh dengan mengembangkan produk-produk turunan yang memiliki daya saing tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional. Komisi VII berharap kepada pemerintah pusat dan daerah adanya kebijakan yang mendukung hilirisasi, baik melalui insentif fiskal, peningkatan infrastruktur, maupun penyederhanaan regulasi.

Saleh Daulay mengatakan Komisi VII DPR berkomitmen terus mendukung perkembangan industri kelapa sawit yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat menghadapi tantangan dan mengoptimalkan peluang yang ada. ■





BERBAGI BERSAMA ANAK YATIM YAYASAN AL MUKHLISIN

Selain GAPKI dan Astra Agro Lestari, kegiatan ini juga didukung oleh Wilmar dan Apical.

Bulan Ramadhan 1446 H menjadi momentum positif untuk meningkatkan silaturahmi dan menyampaikan pesan positif tentang kelapa sawit kepada berbagai kalangan. Momentum ini dimanfaatkan oleh Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bersama GAPKI dan PT Astra Agro Lestari, Tbk menggelar kegiatan berbagi dengan anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan Yayasan Al Mukhlisin, Jakarta pada 20 Maret 2025. Selain GAPKI dan Astra Agro Lestari, kegiatan ini juga didukung oleh Wilmar dan Apical.

Ketua Kompartemen Media Relation GAPKI, Fenny Sofyan mengatakan kelapa sawit sebagai komoditas andalan dalam negeri perlu disampaikan kepada khalayak luas. Tidak terkecuali adik-adik di panti asuhan. Apalagi sawit kelapa sangat penting bagi pemenuhan pangan di Indonesia dan dunia.

Fenny Sofyan mengatakan hampir setiap aspek kehidupan manusia

bersentuhan dengan produk turunan sawit. Dari buah sawit yang kecil berwarna merah, dihasilkan minyak yang menjadi bahan baku berbagai produk, mulai dari minyak goreng hingga kosmetik seperti lipstik, sampo,

dan pasta gigi. Artinya, setiap hari kita menggunakan produk berbasis sawit, bahkan dari ujung kepala hingga ujung kaki.

Sedangkan dari aspek kesehatan, minyak sawit kaya dengan vitamin A dan E. Kandungan ini lebih tinggi dibandingkan wortel. Yang tidak kalah penting adalah industri sawit menjadi tempat bagi 16 juta orang bekerja dan mencari nafkah. Namun, industri sawit Indonesia saat ini menghadapi tantangan mulai dari menurunnya produktivitas, ketatnya persaingan global, hingga maraknya isu negatif yang kerap menyerang sektor ini.

Fenny Sofyan mengajak adik-adik panti asuhan memanjatkan doa bagi keberlangsungan industri sawit Indonesia agar tetap maju dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Doa dari anak-anak yatim dikenal mustajab dan makbul. Apalagi dilakukan di bulan Ramadhan sebagai bulan mulia umat Islam.

Sementara itu, Sekjen Forwatan Beledug Bantolo menegaskan kegiatan sosial ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan, terutama anak-anak yatim piatu. Selain sebagai ajang berbagi, kegiatan ini menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai industri kelapa sawit dan produk turunannya. Tapi, masyarakat belum banyak yang memahami manfaat besar produk turunan sawit. ■



SINERGI GAPKI-PBNU DUKUNG SAWIT UNTUK KEMANDIRIAN EKONOMI



LPPNU akan merumuskan fiqih sawit, seperti NU pernah menetapkan fiqih tembakau untuk membela petani tembakau.

GAPKI dan PBNU untuk mendukung kemandirian ekonomi, salah satunya melalui dukungan terhadap program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan hilirisasi sawit. Sinergi dukungan ini disampaikan Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU) Tri Candra Aprianto dalam FGD bertajuk *Memperkuat Ekonomi Kelapa Sawit untuk Kemandirian Ekonomi Indonesia* di Jakarta pada 5 Februari 2025.

FGD yang digelar sebagai bagian dari rangkaian Harlah ke-102 Nahdhatul Ulama ini turut menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Guru Besar IPB Prof. Sudarsono, Ketua PBNU KH Miftah Faqih, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, dan Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit seluruh Indonesia (APKASINDO) sebagai pemantik diskusi.

Dalam FGD ini, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menjelaskan bahwa industri sawit dapat berkembang

apabila mendapatkan dukungan kuat dari seluruh stakeholder. Salah satunya dalam bentuk regulasi yang memudahkan industri sawit, kepastian lahan dan produksi hasil perkebunan berkembang di Indonesia. GAPKI berharap pemerintah meningkatkan ekspor CPO di tengah program biodiesel B40.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, volume ekspor CPO Indonesia pada 2024 sebesar 21,6 juta ton atau turun 17,33% dibandingkan pada 2023. Begitu pula secara nilai, ekspor CPO anjlok 11,78% menjadi US\$ 20,01 miliar atau setara dengan Rp325,8 triliun pada 2024 (kurs Rp16.280/US\$). Hal ini karena masih banyak kebun sawit yang belum terkelola dengan baik, termasuk oleh petani mandiri. Karena itu, PSR harus mendapatkan perhatian lebih.

Melalui program PSR, pemerintah berencana meremajakan sawit rakyat seluas 180 ribu hektare melalui dinas dan 20 ribu hektare melalui kemitraan dengan perusahaan sawit di Indonesia. Program peremajaan sawit rakyat

inilah yang mendapat dukungan penuh dari PBNU karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi mayoritas petani sawit mandiri berasal dari warga Nahdliyin.

Selain mendukung PSR dan mendorong hilirisasi, LPPNU juga menyoroti tantangan global terhadap industri sawit nasional, terutama kampanye hitam dari sejumlah pihak, salah satunya Uni Eropa. LPPNU membandingkan situasi ini dengan industri tembakau di masa lalu yang juga menghadapi resistensi global. LPPNU akan merumuskan fiqih sawit, seperti NU pernah menetapkan fiqih tembakau untuk membela petani tembakau. ■



CNFA DORONG GAPKI PERKUAT PASAR CPO DI CHINA

CNFA memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan perdagangan di China.

China Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-products (CNFA) mengapresiasi industri sawit di Indonesia yang menjalankan prinsip sawit berkelanjutan. Apresiasi ini diberikan setelah melihat sistem pengelolaan kebun sawit, proses pengolahan buah sawit, penelitian dan pusat konservasi yang dikelola oleh PT Tirta Kimia Utama di Kabupaten Siak, Riau, 27 Februari 2025. Delegasi China ini dipimpin Presiden CNFA, Cao Derong yang didampingi Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan pengurus GAPKI Pusat dan GAPKI Riau lainnya.

CNFA memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan perdagangan di China. CNFA menjalin kerjasama juga dengan WWF China untuk mempromosikan produk berkelanjutan seperti CPO dan minyak kedelai. Delegasi ini ingin meninjau perkebunan sawit yang mengantongi sertifikat keberlanjutan RSPO/ISPO. Karena itu, kunjungan ini sangat strategis bagi industri sawit di Indonesia karena China salah satu negara utama tujuan ekspor CPO Indonesia.

Dalam kebijakan perdagangan di China, CNFA juga berperan memastikan

seluruh rantai pasok minyak sawit yang masuk ke China telah memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan. Di sisi yang lainnya, WWF China memiliki visi mengawal produksi, perdagangan, dan konsumsi minyak sawit yang bertanggung jawab untuk melindungi, merestorasi, dan menghubungkan lanskap alam yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, CNFA dan WWF China mengembangkan China Sustainable Palm Oil Alliance (CSPOA) yang memiliki 26 anggota dari berbagai sektor untuk mendorong penerapan minyak sawit berkelanjutan di China. CNFA dan WWF China mendorong adanya kolaborasi dengan GAPKI untuk mengembangkan inisiatif dan menyusun *roadmap* rantai pasok minyak sawit berkelanjutan yang melibatkan kedua negara.

Kolaborasi CNFA dan WWF China dengan GAPKI diharapkan dapat diwujudkan dalam kerja-kerja konkret untuk mendukung praktik minyak sawit berkelanjutan. Peningkatan dialog dan pertukaran informasi menjadi



langkah awal yang strategis untuk mewujudkan kolaborasi ini. Selain itu, pengembangan kebijakan yang selaras dengan prinsip sawit berkelanjutan global akan terus ditingkatkan.

CNFA dan WWF China berharap kerjasama dengan GAPKI berjalan produktif dan saling menguntungkan. Beberapa area kerjasama yang diharapkan antara lain penguatan skema berkelanjutan ISPO agar lebih sejalan dengan skema berkelanjutan internasional, kerjasama untuk memperluas dan meningkatkan

praktik berkelanjutan dan *good agricultural practices* untuk para petani, serta kerjasama promosi ISPO di pasar China. ■



PRODUKSI DAN KONSUMSI CPO TURUN, STOK MENINGKAT

Penurunan ekspor terjadi untuk tujuan Pakistan, China, India, Malaysia, dan USA.

Produksi minyak sawit mentah (CPO) sepanjang Januari 2025 lebih rendah dibandingkan Desember 2024 maupun Januari 2024. Total produksi CPO Januari 2025 sebesar 4.184 ribu ton yang terdiri dari 3.828 ribu ton CPO dan 356 ribu ton PKO. Sedangkan total produksi CPO Desember 2024 sebesar 4.237 ribu ton dan Januari 2024 sebesar 4.634 ribu ton. Total produk CPO Januari 2025 turun 1,25% dibandingkan Desember 2024 dan 9,7% dibandingkan total produksi Januari 2024.

Dalam pemaparan kinerja sawit Januari 2025 ini, Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono mengatakan penurunan juga terjadi pada konsumsi. Total konsumsi Januari 2025 sebesar 1.871 ribu ton, lebih rendah 14,45% dibanding konsumsi bulan Desember 2024 sebesar 2.187 ribu ton. Penurunan

21,12% terjadi pada pangan dari 961 ribu ton pada Desember 2024 menjadi 758 ribu ton pada Januari 2025. Biodiesel turun dari 1.046 pada Desember 2024 menjadi 916 ribu ton.

Sejalan dengan penurunan produksi dan konsumsi, ekspor juga mengalami hal yang sama. Total ekspor Januari 2025 sebesar 1.960 ribu ton, lebih rendah dibandingkan Desember 2024 sebesar 2.060 ribu ton.

Ekspor oleokimia turun 9,43% yakni dari 428 ribu ton pada Desember 2024 menjadi 388 ribu ton. Sedangkan ekspor CPO turun dari 69 ribu ton pada Desember 2024 menjadi 39 ribu ton pada Januari 2025. Ekspor produk olahan CPO dari turun tipis 1.465 ribu ton pada Desember 2024 menjadi 1.449 ribu ton.

Penurunan ekspor Januari 2025 dapat dilihat

dari negara tujuan. Ekspor ke Pakistan 199 ribu ton (-53%), China 197 ribu ton (-42%), India 62 ribu ton (-36%), Malaysia 60 ribu ton (-41%), USA 49 ribu ton (-22%). Kenaikan ekspor hanya terjadi untuk tujuan Uni Eropa 69 ribu ton (+53%), Afrika 48 ribu ton (18%) di antaranya tujuan Mesir 37 ribu ton (73%).

Penurunan volume ekspor dan penurunan harga dari US\$ 1.313/ton Cif Rotterdam pada bulan Desember 2024 menjadi US\$ 1.208 menyebabkan penurunan nilai ekspor dari US\$ 2.379 juta (setara Rp 38 triliun) menjadi US\$ 2.274 juta (setara Rp 36 triliun). Total nilai ekspor produk minyak sawit pada Januari 2025 tersebut adalah sekitar 10,9% dari total ekspor non migas yang mencapai US\$ 20,84 miliar.

Dengan produksi, konsumsi, dan ekspor yang terjadi sepanjang Januari 2025, kata Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono, maka stok akhir Januari 2025 sebesar 2.936 ribu ton, naik 360 ribu ton dari bulan sebelumnya sebesar 2.576 ribu ton. ■



MEMPERTEGAS PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN

GAPKI berharap perlindungan pekerja perempuan tidak sebatas pada memahami peraturan dan regulasi terkait.

Sejalan dengan perayaan Hari Kartini pada 21 April 2025, memperkuat perlindungan terhadap pekerja perempuan di perkebunan sawit di Jambi terus digelorakan. Penguatan ini diwujudkan oleh GAPKI dalam *Sosialisasi dan Workshop Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit* di Hotel Aston, Jambi pada 23-24 April 2025. Kegiatan yang didukung oleh BDPD ini merupakan kegiatan kelima yang diselenggarakan oleh GAPKI. Pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi GAPKI yang berkomitmen tinggi melindungi pekerja perempuan.

Sosialisasi dengan beragam tema ini menghadirkan lima pembicara yakni Rinaldi Umar (Direktur Binariksa Kemnaker), Sumarjono Saragih (Kabid Pengembangan SDM GAPKI), Aida Fitria (Kadiv Lembaga Kemasyarakatan dan Civil Society), BDPD, Agustina (Bagian Teknik dan Infrastruktur PT Sari Aditya Loka), dan Nursanna Marpaung (Sekretaris Eksekutif JAPBUSI). Workshop selama dua hari ini dihadiri 50 peserta perwakilan perusahaan, perwakilan serikat pekerja dan pemerintah.

Plt Kadisnakertrans Provinsi Jambi, Dodi Haryanto Parmin mengapresiasi kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman komitmen

pengusahaan dalam perlindungan pekerja perempuan. Sosialisasi dan workshop ini diharapkan tidak hanya bermanfaat untuk peserta, tapi juga untuk pemerintah setempat. Dodi mendorong GAPKI memperluas kolaborasi menjalankan program-program positifnya untuk memberikan kebermanfaatan bagi seluruh pihak.

Ketua Bidang Pengembangan SDM GAPKI, Sumarjono Saragih mengatakan komitmen GAPKI dalam perlindungan pekerja perempuan tidak pernah berubah. Bahkan, disesuaikan dengan dinamika industri dan kebutuhan perempuan. Karena itu, berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan perempuan, GAPKI berpartisipasi aktif dan menjadi inisiator sejumlah kegiatan untuk perlindungan pekerja perempuan.

Menurut Sumarjono Saragih, perempuan merupakan agen perubahan untuk meningkatkan aspek positif dalam perkebunan kelapa sawit. Karena itu, GAPKI mengorganisasikan hingga mewadahi hak perlindungan pekerja kelapa sawit khususnya pada wanita dalam kegiatan dan wadah tersendiri. Hal ini penting karena lebih dari separuh pekerja belum memiliki sertifikasi terkait perlindungan pekerja.

GAPKI berharap perlindungan pekerja perempuan tidak sebatas pada



memahami peraturan dan regulasi terkait. Langkah terbaik adalah mewujudkan perlindungan dalam bentuk aksi konkret dan peraturan perusahaan yang mendukung. Dengan cara ini, pekerja perempuan lebih aman dan nyaman dalam bekerja dan terpenuhi setiap hak-haknya. ■



GAPKI AJAK PENGUSAHA DAN PETANI REPLANTING SAWIT

Berdasarkan data BPDP, sepanjang tahun 2024 realisasi PSR hanya mencapai 38.244 hektare.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengajak perusahaan perkebunan dan petani sawit menjalankan peremajaan sawit agar program ini sukses. Apalagi tidak sedikit tanaman sawit perusahaan dan petani yang berusia tua, lebih dari 25 tahun dan sudah tidak produktif lagi. Keberhasilan program ini akan berdampak positif bagi kedua pihak. Ajakan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional ASPEKPIR di Jakarta pada 29 April 2025.

Ada beberapa faktor yang menghambat peremajaan, salah satunya penurunan pendapatan selama tanaman belum menghasilkan. Namun, kondisi ini tidak berlangsung lama, sekitar 2 hingga 2,5 tahun saja. Ketika sawit mulai berbuah, produktivitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya karena peremajaan sawit menggunakan bibit unggul. Karena itu, investasi *replanting* sebenarnya sangat menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang.

Menurut Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, saat ini hampir seluruh anggota GAPKI telah rutin melakukan *replanting* sebesar 4–5%



dari total luas tanaman yang sudah waktunya diremajakan setiap tahun yakni sekitar 3-4 juta hektar. Luas lahan yang diremajakan cukup ideal karena tidak terlalu membebani arus kas perusahaan. Kalau peremajaan diabaikan, perusahaan justru merugi dalam jangka panjang.

Selain mengajak sektor swasta meningkatkan peremajaan sawit, GAPKI juga mendorong perusahaan dan petani antusias menjalankan program PSR yang masih mengalami banyak hambatan. Dari target 180.000 hektare/ tahun, realisasinya belum menyentuh 30 persen. Padahal, sejak September 2024, pemerintah meningkatkan dana bantuan PSR dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektare, dan target tahunan pun sudah diturunkan menjadi 120.000 hektare. Namun realisasi di lapangan tetap rendah.

Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sepanjang tahun 2024 realisasi PSR hanya mencapai 38.244 hektare. Sementara di kuartal pertama 2025, baru menyentuh angka 11.777 hektare. Dengan pencapaian ini target 120.000 hektare tahun ini tampaknya akan sulit dicapai. Upaya peningkatan realisasi lahan yang diremajakan sudah dilaksanakan dengan berbagai terobosan.

Ada banyak faktor yang menghambat program PSR. Salah satunya keengganan petani untuk menebang sawit yang masih tampak produktif. Padahal usianya sudah uzur, di atas 25 tahun dan bahkan 30 tahun. Selain itu, ada kendala teknis dan administratif yang tidak dapat sulit dipenuhi oleh petani sehingga menyebabkan dana bantuan tidak kunjung cair. ■



PENGUKUHAN PENGURUS GAPKI KALSEL 2024-2029

Soliditas organisasi sangat penting untuk menghadapi tantangan industri sawit di masa mendatang.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menekankan pentingnya tata kelola organisasi GAPKI yang sesuai dengan AD/ART GAPKI terbaru. Hal ini disampaikan dalam pelantikan dan pengukuhan pengurus GAPKI Cabang Kalimantan Selatan periode 2024-2029 di Rattan Inn, Banjarmasin pada 19 Februari 2025. Ketua GAPKI Kalimantan Selatan 2024-2029 dijabat oleh Eddy S Binti yang terpilih dalam Muscab GAPKI Kalsel pada 4 Oktober 2024.

Pelantikan dan pengukuhan pengurus GAPKI Cabang Kalimantan Selatan 2024-2029 dihadiri juga oleh Sekjen GAPKI M. Hadi Sugeng, Wakil Ketua Umum III Satrija B. Wibawa, Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono, dan pengurus lainnya. Pengukuhan juga dibarengi dengan pengesahan pengurus GAPKI Cabang Sumatera Barat periode 2024-2029 yang dipimpin oleh Bambang



Wiguritno.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengingatkan soliditas organisasi sangat penting untuk menghadapi tantangan industri sawit di masa mendatang. Sektor sawit yang strategis masih menghadapi banyak tantangan antara lain stagnansi produktivitas dan tingkat produksi yang melandai belakangan ini. Tantangan lain yang juga berat adalah kebun sawit dalam kawasan hutan dan implementasi FPKM 20% serta pengelolaan pabrik kelapa sawit tanpa kebun.

Pengurus GAPKI Kalimantan Selatan yang baru diminta untuk menyesuaikan program kerja dengan program utama GAPKI Pusat agar organisasi berjalan baik. Soliditas organisasi perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan ke depan. GAPKI Kalimantan Selatan juga diminta meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi karena pada dasarnya GAPKI adalah mitra strategis pemerintah.

Gubernur Kalimantan Selatan yang

diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan juga mendorong GAPKI Cabang Kalsel untuk meningkatkan kerjasama strategis. Keberadaan perusahaan sawit di Kalimantan Selatan terbukti memberi dampak positif bagi masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit. Selain perwakilan Gubernur Kalimantan Selatan, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Kapolda Kalimantan Selatan, Korem 101 Antarasi, pejabat Bupati Tanah Laut dan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Pemprov Kalsel.

Dalam pengukuhan pengurus ini, Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono mengatakan tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan berkelanjutan akan berperan signifikan dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk membangun kepercayaan anggota, seluruh kegiatan organisasi harus dikelola dengan transparansi. Sedangkan akuntabilitas diterapkan dalam pelaksanaan program kerja, pengelolaan keuangan, dan pelaporan hasil. ■



GUBERNUR MINTA GAPKI SUMSEL SEMAKIN SOLID

*Soliditas organisasi
berbanding lurus dengan
kontribusinya terhadap
daerah dan masyarakat.*

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru meminta GAPKI Cabang Sumatera Selatan semakin solid sebagai pondasi organisasi dalam menghadapi tantangan ke depan. Hal ini disampaikan oleh Gubernur dalam pelantikan Pengurus GAPKI Cabang Sumatera Selatan periode 2024-2029 di Excelton Hotel, Palembang, 20 Maret 2025. Kehadiran Gubernur dalam pelantikan ini adalah bentuk dukungan konkret untuk GAPKI Sumsel.

GAPKI Sumsel periode 2024-2029 dipimpin oleh Alex Sugiarto. Pelantikan ini diikuti semua jajaran pengurus cabang, dewan pembina, dan bidang-bidang terkait. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal GAPKI M. Hadi Sugeng.

Selain Gubernur, Bupati Musi Banyuasin H.M. Toha Tohet, Kadisbun Provinsi Sumsel Agus Darwa dan para kepala OPD Provinsi Sumsel



menghadiri pelantikan ini.

Gubernur mengatakan bahwa soliditas internal organisasi adalah pondasi guna menjalankan dan mengembangkan organisasi. Dengan kontribusi industri sawit terhadap pembangunan di Sumatera Selatan selama ini, soliditas organisasi berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap daerah dan masyarakat. Apalagi industri sawit menjadi salah satu sektor penting dalam ketahanan pangan dan energi.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan tantangan industri sawit semakin besar di tengah ketidakpastian global. Kebutuhan pasar domestik dan global yang meningkat belum dibarengi dengan peningkatan produksi yang signifikan.

Produksi sawit dalam lima tahun ini masih landai dan cenderung stagnan. Karena itu, GAPKI mesti mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan produktivitas sawit di tanah air.

GAPKI berharap iklim investasi di tanah air semakin aman dan

nyaman sehingga para pelaku dunia usaha, terutama sawit dapat menjalankan bisnisnya dengan tenang. Kepastian hukum adalah faktor kunci membuat pengusaha tenang sehingga dapat berfokus pada peningkatan produktivitas tanaman. Peningkatan produksi sawit di suatu daerah, berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, kemitraan strategis dengan pemerintah dan masyarakat harus dijalankan secara proporsional dan seimbang.

Ketua GAPKI Cabang Sumsel, Alex Sugiarto menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung program ketahanan pangan dan energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dalam program ini, sektor sawit menjadi andalan utama karena bisa merealisasi dua target sekaligus, yakni padangan dan energi. Karena itu, GAPKI Sumsel akan mengajak perusahaan sawit bergabung ke GAPKI agar kontribusi yang diberikan semakin signifikan. ■



ARIS SUPRATMAN PIMPIN GAPKI CABANG KALBAR

Dalam waktu 5 tahun ke depan, ada penambahan 10 perusahaan baru sebagai anggota.

GAPKI Kalbar berkomitmen memberikan pendampingan bagi anggota untuk menyelesaikan masalah, terutama isu kebun sawit di kawasan hutan. Kalimat ringkas dan tegas itu dipaparkan oleh Aris Supratman setelah terpilih menjadi Ketua GAPKI Kalimantan Barat 2025-2030 dalam Musyawarah Cabang GAPKI Kalbar ke-VI di Hotel Aston Pontianak, 27 Februari 2025. Aris menggantikan ketua sebelumnya, Purwati Munawir yang memberikan selamat atas amanah ini.

Muscab ini mengangkat tema Kepastian Hukum dan Kemitraan sebagai Pilar Mewujudkan Sawit Berkelanjutan yang Kondusif. Tema ini dipilih sebagai gambaran semangat



GAPKI Kalbar dalam merespon kondisi terkini yang terjadi pada industri sawit. Sebagai salah satu sentra sawit di Indonesia, Kalimantan Barat memiliki peran signifikan dalam penyelesaian masalah nasional, terutama masalah di daerah. Aris Supratman menegaskan kepengurusan GAPKI Kalbar 2025-2030 akan merangkul semua pihak agar lebih aktif dalam berorganisasi. Selain itu, pihaknya juga berkomitmen menambah jumlah anggota GAPKI Kalbar. Berdasarkan data BPS 2023, jumlah perusahaan sawit di Kalbar 343 perusahaan dengan luasan total sekitar 1,58 juta hektar. Sedangkan anggota GAPKI Kalbar sebanyak 78 perusahaan dengan total luasan 284,9 ribu hektar.

Sebagai Ketua GAPKI Kalbar yang baru, Aris menargetkan 5-10 perusahaan bergabung dengan GAPKI Kalbar dalam satu tahun ke depan. Penambahan anggota sangat penting agar pihaknya benar-benar menjadi representasi industri kelapa sawit di Kalimantan Barat. Jumlah anggota yang cukup besar juga menambah

daya tawar organisasi dalam menangani masalah-masalah yang melibatkan anggota atau industri sawit pada umumnya.

Namun, mengingat salah satu misi GAPKI adalah sebagai mitra strategis pemerintah terutama dalam tata kelola perkebunan besar sawit yang baik, sudah sewajarnya semua perusahaan sawit menjadi anggota GAPKI. Untuk itu, kami sangat mengharapkan Pengurus baru nantinya dapat mendorong semua perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat untuk dapat menjadi anggota GAPKI.

Saat ini, GAPKI Kalimantan Barat memiliki 78 perusahaan anggota. Diharapkan dalam waktu 5 tahun ke depan, ada penambahan 10 perusahaan baru sebagai anggota. Tambahan anggota ini penting agar GAPKI benar-benar menjadi representasi industri sawit di Kalbar. Jumlah anggota yang memadai akan membuat daya tawar GAPKI semakin kuat sehingga advokasi bagi anggota semakin terasa besar manfaatnya. ■